

***THE PUBLIC SPHERE AS THE EDUCATION OF MULTICULTURALISM
AWARENESS***

**RUANG PUBLIK SEBAGAI PENDIDIKAN KESADARAN
MULTIKULTURALISME**

Oleh :
Yusar

Program Studi Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran
Email: yuzzsar@gmail.com

Abstract. This article was endeavor to describe the awareness multicultural education in the Chinese Lampion Festival in Kota Bandung since 2011 to 2013. The research was held with the longitudinal, qualitative, and adopt to the action research methods. The evidence was describe that the public sphere was success to build the communicative action between the native ethnics and the Chinese. By the public sphere, each ethnics perceived their cultural differences and appreciate as an equality. By this public sphere, the multiculturalism awareness was formed succesfully and reduce the ethnical stereotype between the native ethnics and the Chinese. This article conclude that the awareness multicultural education may be doing by creating the public spheres.

Keywords: public sphere, education, multiculturalism

Abstrak. Artikel ini menggambarkan pendidikan kesadaran multikulturalisme melalui perayaan Cap Go Meh. Etnis-etnis tempatan yang mengklaim sebagai pribumi memiliki stereotype etnis yang kuat terhadap etnis Tionghoa. Penelitian telah dilakukan dengan paradigma kualitatif yang bersifat longitudinal mengadopsi pada metode action research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang publik yang dibangun antara etnis tempatan dengan etnis Tionghoa memunculkan tindakan komunikatif antar etnis. Melalui penciptaan ruang publik tersebut, kesadaran akan keberagaman muncul dari masing-masing etnis dan memadang bahwa budaya masing-masing berdiri setara dan muncul penghargaan atas masing-masing kebudayaan. Pemahaman multikulturalisme terbangun karena ruang publik yang diciptakan. Bagian penutup dijelaskan bahwa pendidikan kesadaran multikultur dapat ditempuh melalui penciptaan ruang-ruang publik.

Kata kunci: ruang publik, pendidikan, multikulturalisme

A. PENDAHULUAN

Wacana mengenai sikap hidup bersama pada masyarakat multikultural seolah tak habis-habisnya untuk dikaji. Berbagai pendapat dihasilkan untuk memberikan alternatif pemecahan masalah-masalah multikultur. Secara konseptual, multikulturalisme dapat

dinyatakan sebagai sikap tertentu untuk mengakui keragaman dalam masyarakat (Juliawan, 2004: 35; dalam Supartiningsih, 2012: 239). Meski demikian, kesadaran pengakuan terhadap keberadaan dan kehadiran budaya lain cenderung pasang surut, seiring dengan tingginya rasa primordial dan tajamnya perbedaan

budaya. Anasir-anasir masyarakat pun cenderung memaksakan standar budayanya terhadap budaya lain. Pemaksaan budaya tersebut pada muaranya dapat menghasilkan konflik komunal antar suatu masyarakat penyandang budaya dengan masyarakat penyandang budaya lain.

Sebuah bangsa multikultur seperti Indonesia memiliki potensi konflik yang besar. Konflik tersebut didasari oleh perbedaan-perbedaan cara hidup dan identitas kelompok-kelompok kultur. Dalam perbedaan cara hidup dan identitas kelompok-kelompok kultur tersebut, sangat mungkin terjadi prasangka etnis yang dapat memicu pada terjadinya konflik komunal. Mengacu pada Suryadinata (2002), perbedaan cara hidup dan identitas kelompok kultur yang paling mencuat adalah antara etnis Tionghoa dengan etnis-etnis tempatan. Terlebih dari sisi fisik tubuh, etnis Tionghoa sangat berbeda dengan etnis-etnis tempatan. Demikian pula dalam sistem religi Konfusian yang jauh berbeda dengan masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Strata ekonomi etnis Tionghoa berada di atas etnis-etnis lainnya di Indonesia. Umumnya etnis Tionghoa bergerak di sektor perniagaan dan memiliki tempat yang strategis, yaitu berada di pusat-pusat kota. Dengan letak demikian, etnis Tionghoa dapat dipandang sebagai penggerak ekonomi kota sekaligus merupakan kekuatan kapitalisme lokal yang memiliki otonomi dan menguasai

sumber-sumber daya yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. (Suryadinata, 2002).

Perbedaan-perbedaan yang disebutkan di atas, yaitu identitas kultural, ras ketubuhan, sistem religi, dan strata ekonomi pada gilirannya menghasilkan stereotipe etnis dari etnis tempatan terhadap etnis Tionghoa. Prasangka dan diskriminasi tersebut menjadi pemicu terjadinya konflik antara etnis Tionghoa dengan etnis tempatan di berbagai wilayah di Indonesia. Konflik tersebut dapat meledak menjadi konflik komunal jika sekat-sekat antara etnis Tionghoa dengan etnis tempatan tidak dibuka. Mengacu pada Yusar (2011), sejarah mencatat bahwa terdapat lima kasus konflik komunal antara etnis tempatan dengan etnis Tionghoa, yakni:

1. di Kudus, tahun 1918;
2. di Bandung, tahun 1963;
3. di Pontianak, tahun 1967;
4. di Makasar, tahun 1997; dan
5. di Jakarta serta Surakarta, tahun 1998.

Dalam konflik tersebut, etnis Tionghoa menjadi sasaran kekerasan etnis tempatan. Sifat kekerasannya berupa perusakan dan/atau pembakaran aset, pemerkosaan, pengusiran, hingga penghilangan nyawa secara masif. Konflik-konflik yang terjadi dapat dipahami sebagai minimnya kesadaran kebangsaan yang multikultur. Minimnya kesadaran kebangsaan yang multikultur

merupakan habitus masyarakat yang terejawantah menjadi praktik-praktik perilaku, termasuk di dalamnya stereotipe etnis.

Pendidikan kesadaran multikultur dapat ditempuh melalui serangkaian tindakan nyata dalam masyarakat yang bersifat membuka wawasan atas keragaman budaya beserta relativitasnya. Pendidikan secara langsung untuk membuka wawasan tersebut dilakukan dengan mengadopsi konsep ruang publik karya Jurgen Habermas. Ruang publik menurut Habermas (1984) merupakan manifestasi dari pendidikan kesadaran atas perbedaan yang sederajat, meliputi perbedaan yang bersifat individu maupun budaya.

Untuk membuka kesadaran multikultur, rangkaian perayaan *Cap Go Meh* merupakan ajang pendidikan kesadaran multikulturalisme bagi masyarakat. *Cap Go Meh* bermakna sebagai penanda hari ke-lima belas dari Tahun Baru Imlek. Umumnya di beberapa tempat di Indonesia, perayaan *Cap Go Meh* dilakukan secara kolosal dan melibatkan banyak orang, baik dari etnis Tionghoa maupun etnis-etnis tempatan, melakukan arak-arakan *ta pe kong* dengan menggunakan tandu khusus (*joli*) berkeliling di jalan-jalan utama. Pembauran tersebut dapat meningkatkan kohesi sosial antar etnis (Yusar, 2011).

Dalam perayaan *Cap Go Meh*,

mengacu pada Habermas (1989) secara implisit terjadi bangunan ruang publik yang mencakup kontradiksi antar kepentingan etnis Tionghoa dan kepentingan etnis-etnis tempatan di lain pihak. Dalam ruang publik ini terdapat serangkaian dialog yang setara yang bertujuan untuk mengatasi perbedaan-perbedaan dalam berbagai kepentingan dan pendapat pribadi antar etnis guna menemukan kepentingan umum serta mencapai konsensus bersama (Hardiman, 2008). Penghargaan atas perbedaan-perbedaan dan kesederajatan budaya dipertukarkan dalam serangkaian tindakan komunikatif yang tidak berakhir hanya di ruang publik, tetapi membentuk pemahaman multikultur.

Pemahaman multikultur merupakan habitus baru yang hendak digagas dalam kehidupan masyarakat multikultur. Habitus mengacu pada Bourdieu (1979: vii; dalam Harker et al, 2009: xix) merupakan hasil pembelajaran lewat pengasuhan, aktivitas bermain, dan juga pendidikan masyarakat dalam arti luas. Pembelajaran tersebut terjadi dalam dialog-dialog yang secara halus, tidak disadari, dan tampil sebagai hal yang wajar dalam interaksi manusia. Dari dialog-dialog dalam ruang publik, seseorang menyerap informasi dari orang lain, dan menambah pengetahuan yang mengisi relung habitusnya. Penambahan atau perubahan dalam habitus, pada gilirannya akan mengubah praktik-praktik

perilaku, baik yang bersifat individual maupun massal.

Pendidikan kesadaran multikultural melalui ruang publik pada hakikatnya berlangsung atas dasar tindakan-tindakan komunikatif yang dinyatakan oleh Habermas (1984; dalam Supartiningsih, 2012: 240) sebagai pengembangan konsep rasionalitas kehidupan bersama. Dialog rasional merupakan salah satu dasar terpenting untuk mewujudkan kehidupan bersama secara damai dengan segala keragaman latar budayanya (Supartiningsih, 2012: 240). Dengan kata lain, ruang publik merupakan sarana dialog rasional yang mendidik antar golongan untuk dapat bersama dan berdamai dengan berbagai latar belakang budaya yang berbeda.

1. Rumusan masalah

Berdasar uraian pada bagian latar belakang di atas, ruang publik merupakan sebuah ruang strategis guna menjalankan pendidikan kesadaran multikulturalisme pada masyarakat. Ruang publik yang di dalamnya terjadi pertukaran informasi antar individu dan juga budaya dapat memberi input bagi habitus setiap individu yang berada di dalamnya. Serangkaian input yang didapatkan dari dialog dalam ruang publik dapat mengubah habitus seseorang. Perubahan habitus tersebut pada gilirannya dapat mengubah praktik-praktik perilaku sebelumnya. Dalam rumusan masalah ini, dibatasi dalam pertanyaan-

pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana bentuk ruang publik yang diciptakan untuk menjalankan proses pendidikan multikultural.
- b. Bagaimana proses pendidikan multikultural yang terjadi dalam ruang publik mengubah habitus dan praktik masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan terbangunnya pemahaman multikultur hasil ruang publik yang diciptakan secara deliberatif antara etnis Tionghoa dengan etnis-etnis tempatan. Dalam hal ini, ruang publik merupakan arena pendidikan kesadaran multikultur, khususnya antara etnis Tionghoa dan etnis-etnis tempatan.

2. Kajian Pustaka

a. Ruang Publik

Konsep ruang publik dikenalkan oleh Jurgen Habermas, seorang teoretisi kritis Mahzab Frankfurt. Habermas (1984; 1989; 2007; 2008) menyatakan bahwa ruang publik merupakan arena bagi warga negara untuk berdiskusi, berdialog, dan bertukar pikiran mengenai hubungan bersama antara mereka. Habermas (1984; 1989; 2007) menyatakan

bahwa ruang publik berbeda dengan negara dan berbeda dengan institusi ekonomi, tetapi merupakan tempat untuk hubungan-hubungan yang berbeda-beda, sekaligus tempat berdebat dan bermusyawarah.

Individu secara privat bergabung untuk mendiskusikan hal-hal atau permasalahan yang menjadi perhatian publik (Kadarsih, 2008: 1). Hal ini memiliki makna bahwa dalam ruang publik, terjadi keterikatan antara individu dengan publisitas, yakni penyampaian hal-hal yang berupa kepentingan umum. Penyampaian tersebut dilakukan dalam bentuk-bentuk sah yang menjamin kebebasan berbicara dan kebebasan berserikat. Ruang publik menjadi ruang bagi jenis interaksi diskursif yang spesifik dan terfokus pada suatu isu yang dianggap sebagai isu bersama.

Ruang publik sebagai ruang interaksi diskursif memiliki pengertian sebagai tempat untuk diskusi-diskusi mengenai hal rasional yang tidak terbatas pada masalah umum semata. Hasil dari diskusi merupakan opini publik yang menjadi konsensus bagi kebaikan bersama (Calhoun, 1993; dalam Kadarsih, 2008:2). Dengan demikian, ruang publik dapat menjadi ruang mediasi antara masyarakat dengan negara. Dalam hal ini publik mengatur dirinya

dan mengorganisasikan dirinya sendiri sebagai pemilik opini publik (Kadarsih, 2008: 2).

Lefebvre (2008) memandang bahwa ruang adalah produk sosial yang dinamis dan dibentuk oleh kelompok yang memiliki kontrol serta dominasi atas kekuasaan. Habermas (1984) menyatakan bahwa ruang publik disusun oleh kaum borjuis dan menggunakan kapital sebagai alat pembentuk ruang publik tersebut. Lebih jauh, pemikiran Habermas mengenai ruang publik terpilah menjadi dua, yakni ruang publik borjuis dan ruang publik dalam kerangka demokrasi liberatif (Habermas, 2007).

Konsensus dapat dicapai dalam ruang publik dan mendapat legitimasi yang kuat. Konsensus diperoleh dengan persetujuan yang rasional melalui partisipasi dan pertimbangan mendalam yang dianggap tepat oleh semua pihak yang berkepentingan terhadap konsensus yang diambil tersebut (Prasetyo, 2012: 177). Konsensus ini dapat menggerakkan pihak-pihak yang berkepentingan dari suatu proyek diskursif menjadi ranah kerja.

Berkait dengan kesadaran multikulturalisme, dalam ruang publik dipandang perlu untuk membangun rasionalitas komunikatif. Mengacu

pada Habermas (2007:255) bahwa kedewasaan rasional sudah tertanam dalam tindakan bicara satu dengan yang lain. Rasionalitas komunikasi adalah tindakan yang mendasari komunikasi antara dua subjek setingkat yang akan tercapai, bila mereka saling mengerti dan memahami (Habermas, 2007:450-451). Rasionalitas komunikatif hanya mungkin dalam hubungan bebas sederajat antara dua subjek. Dengan demikian rasionalitas komunikatif memiliki makna menghargai perbedaan dan mengakui kesederajatan. Hal ini sangat berkesesuaian dengan multikulturalisme sebagai ideologi, masyarakat mengalami proses pembelajaran menerima perbedaan dan mengakui kesederajatannya dengan individu atau budaya lain.

b. Pendidikan

Dalam kehidupannya, manusia tidak dapat dilepaskan dari proses pendidikan. Pendidikan secara hukum formal diatur dan diundang-undangkan secara legal yang bertujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Namun di luar pendidikan yang bersifat formal, pendidikan juga berjalan dalam pranata dan interaksi keseharian antar manusia (Macionis, 2012). Berkaitan dengan topik, pendidikan yang

dimaksud bukanlah kegiatan belajar-mengajar, namun dengan mengacu pada Bourdieu (1979) pendidikan yang dimaksud dalam proses pembentukan habitus dan reproduksi perilaku yang bersifat halus, tidak terasa, dan implisit dalam interaksi keseharian.

Bourdieu (1979: viii), habitus adalah suatu sistem disposisi yang berlangsung lama dan berubah-ubah yang berfungsi sebagai basis generatif bagi praktik-praktik yang terstruktur dan terpadu secara obyektif. Habitus berada di bawah sadar manusia yang membentuk perilaku atau kebiasaan, hasil pembelajaran melalui pengalaman, pengasuhan, aktivitas bermain, dan pertukaran informasi dari interaksi keseharian, serta pendidikan di masyarakat dalam arti luas. Artinya, habitus merupakan produk historis setelah manusia lahir dan berinteraksi dengan masyarakat dalam ruang dan waktu tertentu, tidak bersifat alamiah baik secara psikologis maupun biologis, namun didapat dari pembelajaran masing-masing individu atas dunia sosialnya. (Harker et al, 2005).

Merujuk pada Bourdieu (1979), habitus juga memerlukan ranah atau ruang sosial. Istilah ini mengacu pada keseluruhan konsepsi tentang dunia sosial. Dalam ruang sosial, seorang

individu dengan habitusnya berhubungan dengan individu lain dan berbagai realitas sosial yang menghasilkan tindakan-tindakan sesuai dengan ranah dan modal yang dimilikinya (Harker et al, 2005: xx). Ranah, sebagaimana habitus merupakan produk sejarah yang diciptakan manusia sebagai arena interaksinya.

Aspek lainnya adalah modal (Bourdieu, 1979). Modal merupakan aspek yang tidak terpisahkan dalam konsep habitus dan ranah. Modal diartikan sebagai konsentrasi kekuatan yang beroperasi dalam ranah. Ranah dalam hal ini menuntut individu untuk memiliki modal-modal khusus agar dapat hidup dengan baik di dalamnya (Bourdieu, 1979).

Habitus dan modal dalam suatu ranah menghasilkan praktik (Bourdieu, 1984). Praktik-praktik manusia yang tertampil dalam perilaku merupakan produk dari relasi antara habitus dan modal dengan ranah. Bourdieu (1984: 101) menyatakan rumus generatif dengan persamaan $(\text{Habitus} \times \text{Modal}) + \text{Ranah} = \text{Praktik}$. Suatu pengetahuan baru diterima oleh manusia, habitusnya dapat berubah. Perubahan dalam habitus dapat menyebabkan perubahan dalam praktik. Oleh karenanya, input-input informasi dan

komunikasi dalam kehidupan interaksi antar manusia dapat menambah atau mengubah habitus yang pada gilirannya mengubah tatanan praktik.

Merujuk pada Habermas (1984; dalam Ritzer, 2012: 495-496)), input komunikasi yang dapat mengubah habitus terdapat dalam tindakan-tindakan komunikatif yang tersembunyi dan mendasari, "ada yang tersembunyi" yaitu kekuatan dan kekuasaan tidak menentukan argumen mana yang menang; sebaliknya terdapat konsensus atas realitas kebenaran. Konsensus tersebut diserap dalam habitus, baik secara individual maupun massa.

Konsensus tercipta secara teoritis di dalam wacana tindakan komunikatif dan menambah atau mengubah habitus jika terdapat 4 (empat) syarat kesahihan yang diakui oleh pihak-pihak yang berinteraksi. Pertama, ucapan-ucapan (verbal dan non verbal) pembicara dapat dipahami. Kedua, proposisi-proposisi yang diberikan oleh pembicara dapat diterima kebenarannya. Ketiga, pembicara selalu jujur dan tulus dalam memberikan proposisi-proposisinya dan dapat diandalkan. Keempat, pembicara memiliki dasar normatif untuk berbuat demikian (Habermas, 1984; dalam Ritzer, 2012:

496).

Pendidikan kesadaran multikulturalisme pada hakikatnya merupakan perubahan dalam habitus melalui serangkaian tindakan komunikatif untuk mengubah praktik manusia sebelumnya. Penentangan-penentangan yang tersimpan dalam habitus, berubah seiring diterimanya input-input komunikasi yang menjelma menjadi konsensus untuk menerima berbagai perbedaan sekaligus mengakui kesederajatan antar budaya.

c. Multikulturalisme

Suparlan (2002:1; dalam Supartiningsih, 2012: 241) menyatakan bahwa multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan. Pengakuan tersebut meliputi pengakuan secara individual maupun masyarakat penyandang budaya. Supartiningsih (2012: 241) menyatakan bahwa dalam masyarakat multikultur, suatu masyarakat memiliki kebudayaan yang umum dan di dalamnya terdapat mosaik-mosaik kebudayaan yang lebih kecil. Kebudayaan-kebudayaan kecil serupa itu, pada gilirannya mewujudkan menjadi kebudayaan masyarakat yang lebih besar.

Mengacu pada Liliweri (2005: 68-69), masyarakat multikultur

merupakan masyarakat dengan kondisi budaya yang majemuk. Kondisi tersebut diasumsikan dapat mendorong terjadinya toleransi, tempat masyarakat berbagi pengetahuan dan keyakinan yang dilakukan dalam ranah pertukaran kebudayaan atau perilaku keseharian, serta arena untuk mempelajari kebudayaan lain di sekitarnya yang mungkin berbeda. Dalam hal tersebut, manusia mengalami pendidikan untuk menerima perbedaan dan sekaligus dididik untuk menerima standar umum kebudayaan yang lebih luas.

Pada tataran praksis, multikulturalisme merupakan "politik mengenali" (Supartiningsih, 2012: 242). Dalam proses mengenali tersebut, masyarakat secara langsung mengalami proses pembelajaran mengenali budaya-budaya di luar dirinya, menerima kesederajatan, dan mengakui ketidaktunggalan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Oleh karenanya, multikulturalisme selain sebagai ideologi, merupakan proses *education for recognition* dan juga *education to accept the differences*.

Permasalahan yang muncul dalam masyarakat multikultural adalah perbedaan dari setiap kelompok budaya menganggap bahwa budaya mereka adalah yang

paling unggul, intoleran terhadap perbedaan, dan diskriminatif. Istilah *us versus them* merupakan hal sering muncul ke permukaan. Merujuk pada Supartiningsih (2012) paradigma demikian memunculkan pelabelan-pelabelan terhadap kelompok lain yang mengarah pada pandangan negatif. Pandangan negatif tersebut mengkristal menjadi prasangka, intoleran, dan diskriminatif (Zubair, 2005; dalam Supartiningsih, 2012: 242).

d. Metode Penelitian

Artikel ini disusun berdasarkan penelitian mengenai Perayaan Cap Go Meh di Kota Bandung tahun 2011-2013. Penelitian yang dilakukan berparadigma kualitatif dengan sifat longitudinal yang mengadopsi metode *action research*. Mengacu pada Lippit (1945; dalam Tripp, 2005) *action research* bukanlah menindaklanjuti hasil penelitian dalam bentuk aksi untuk memecahkan masalah melainkan menindaklanjuti hasil penelitian dengan penelitian baru untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Hal tersebut sejalan dengan tanggapan Habermas terhadap Skjervheim (1971: 167; dalam Whyte, 1989), yakni menerjemahkan *practise* sebagai interpretasi hermeneutik dan juga membatasi peneliti pada tataran

diskursus, tidak terlibat lebih jauh hingga mengintervensi masyarakat yang diteliti. Metode tersebut dipandang relevan dengan topik yang diangkat yang memiliki makna pendidikan kesadaran multikultur.

Pengumpulan data dilakukan melalui serangkaian observasi terlibat dalam konteks ruang publik hingga perayaan Cap Go Meh Tahun 2011 hingga 2013. Penulis melibatkan diri secara penuh dan merekonstruksi hasil observasi dan merumuskannya menjadi sebuah laporan penelitian. Observasi terlibat secara langsung dianggap paling efektif dan strategis dalam mengkonstruksikan makna-makna yang terkandung dalam fenomena yang dikaji. Dalam tradisi penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian. Artikel ini merupakan susunan dari konstruksi pemikiran dan tafsir peneliti atas pengalaman-pengalaman sekelompok manusia yang teramati.

Proses penelitian ini membentuk skema dialektik, bermula dari fenomena perayaan *Cap Go Meh* tahun 2011 hingga 2013 di Kota Bandung. Penelitian tahun 2011 mengobservasi upaya peredaman konflik antar etnis dengan hasil peredaman konflik antar etnis dipicu oleh kuasa kapital etnis Tionghoa

yang didistribusikan kepada warga setempat. Pada tahun 2012 peredaman konflik ditunjukkan dengan adanya perilaku membangun ruang publik yang dialogis antar etnis Tionghoa dengan etnis tempatan. Tahun 2013, penelitian diadakan dengan mengobservasi kuasa kapital, ruang publik yang tercipta, serta tindakan-tindakan komunikatif yang dilakukan oleh anggota kelompok baik dari etnis Tionghoa maupun etnis-etnis tempatan. Dari lintasan penelitian tersebut diperoleh temuan terbangunnya kesadaran membuka sekat-sekat komunikasi antara etnis Tionghoa dengan etnis-etnis tempatan. Dari penelitian ini terbangun pengetahuan mengenai peredaman konflik komunal bersifat ganda (*multiple*) yang dilakukan oleh etnis Tionghoa. Di sisi lain, terdapat suatu proses pendidikan yang memunculkan dan meningkatkan pemahaman atas kemajemukan dan kesederajatan budaya dari masing-masing kelompok etnis, yakni semakin menurunnya prasangka etnis.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Obyektif Etnis Tionghoa Di Kota Bandung

Etnis Tionghoa yang bermukim di Kota Bandung terdiri dari berbagai sub-sub etnis, yakni Hakka (Khek),

Hokkian, dan Kongfu. Umumnya tempat asal etnis Tionghoa di Kota Bandung berasal dari daratan China sebelah selatan, yaitu di sekitar daerah Guang Zhou, Hunan, dan Fujian. Dari sekian banyak etnis Tionghoa, afiliasi agama yang dianut terbagi atas 2 bagian besar, yakni pemeluk protestan dan katolik. Pemeluk Taoisme dan/atau Kong Hu Chu hanyalah sebagian kecil dari etnis Tionghoa yang berada di Kota Bandung dan sebagian kecil lainnya memeluk agama Islam.

Kelenteng Dharma Ramsi, salah satu dari sekian banyak kelenteng yang berada di Kota Bandung, terletak di Gang ibu Aisah Kelurahan Cibadak. Kelenteng ini didirikan tahun 1953, dan berada di lingkungan permukiman yang saat itu didominasi oleh etnis Sunda yang beragama islam. Selain kelenteng Dharma Ramsi, di lokasi tersebut, terdapat 6 kelenteng lain. Pada masa tersebut, hubungan antar etnis, yakni etnis Tionghoa dengan etnis tempatan relatif erat dengan jarak sosial yang dekat. Di antara mereka saling mengenal terutama di karenakan para etnis Tionghoa menumpang hidup di tanah-tanah yang dimiliki oleh etnis tempatan, sebelum mereka mampu membeli dan mendirikan rumah sendiri.

Hingga tahun 1980an, hubungan antara etnis Tionghoa dengan etnis tempatan sangat baik. Hal ini dapat digambarkan melalui refleksi masa kecil peneliti yang memiliki banyak teman sepermainan yang berasal dari etnis Tionghoa dan mengenal dengan baik anggota keluarganya. Kehidupan pertetangga antara etnis Tionghoa dengan etnis Sunda dan Jawa menunjukkan kohesi yang kuat, yakni kesamaan sebagai penduduk Gang Ibu Aisah. Kohesi ini juga ditunjukkan dalam perilaku negatif penduduk setempat, seperti berjudi atau minum minuman keras. Dapat dikatakan, etnis Tionghoa dan etnis tempatan tidak memiliki sekat-sekat sosial dan terhubung dengan baik dalam aktivitas kesehariannya.

Seiring perkembangan waktu, di lokasi penelitian terjadi pertumbuhan populasi etnis Tionghoa dan kedatangan "warga baru" beretnis Tionghoa, Batak, dan Minang, wilayah Gang Ibu Aisah (dan Gang Luna yang terletak bersebelahan dengannya) menjadi daerah yang heterogen karena banyaknya penduduk baru. Populasi etnis Tionghoa diperkirakan sebanding dengan populasi etnis "pribumi", yang terdiri dari Sunda dan Jawa. Artinya, jika dilakukan perbandingan antara etnis Tionghoa dengan etnis Sunda,

maka jumlah etnis Tionghoa melebihi jumlah etnis Sunda yang bermukim di daerah tersebut.

Pada masa kekinian, prasangka etnis di lokasi penelitian relatif kental. Etnis-etnis "pribumi" memandang etnis Tionghoa sebagai kelompok yang sombong, arogan, tidak mau mengenal warga, dan terutama merebut lahan hidup mereka karena jumlahnya yang semakin bertambah. Prasangka tersebut hampir selalu dapat didengar ataupun dilihat, termasuk di dalam pengajian warga masyarakat setempat. Prasangka etnis tidak hanya berupa ucapan verbal, seperti istilah "cina", "chun kuo", "babah", ataupun "akew". Gestur pun menunjukkan prasangka etnis, seperti gerakan tangan untuk menyipitkan mata (etnis Tionghoa memiliki ciri mata yang sipit). Prasangka-prasangka tersebut memiliki makna kebencian terhadap etnis Tionghoa. Di sisi lain, anggota dari etnis Tionghoa pun memiliki prasangka etnis terhadap etnis-etnis "pribumi". Prasangka tersebut, meliputi sikap malas, tidak bisa dipercaya, anak-anaknya nakal, dan jorok. Prasangka etnis tersebut membuat hubungan antara etnis Tionghoa dengan etnis-etnis tempatan bagaikan "minyak dalam air".

2. Bentuk Ruang Publik

Menjelang Tahun Baru Imlek

tahun 2011, kuasa kapital mulai bergerak. Untuk memperlancar perayaan *Cap Go Meh*, jemaah kelenteng berswadana melebarkan Gang Ibu Aisah dan melakukan pelapisan beton pada permukaan jalan. Upaya pelebaran jalan tersebut adalah dengan menutup sungai/kali yang terletak di depan kelenteng. Kualitas beton dikontrol dengan sangat ketat dengan maksud agar beton tahan lama dan tidak mudah rusak. Lalu lintas di depan kelenteng menjadi lebih leluasa, demikian pula bau polutan dari sungai/kali dapat diminimalisir karena tertutup oleh beton. Anak-anak warga setempat menjadi dapat bermain di jalan tersebut tanpa mengganggu lalu-lintas. Warga yang memiliki kendaraan roda empat dapat memarkir kendaraannya di tempat tersebut dan keamanannya diawasi oleh pihak kelenteng serta petugas keamanan RW setempat.

Kuasa kapital sangat efektif dalam membentuk ruang publik. Para etnis Tionghoa mengalirkan kapital untuk membentuk suatu ruang berkumpul bagi warga untuk berdialog secara terbuka dengan memanfaatkan jalan yang telah diperlebar melalui betonisasi. Meja dan bangku dalam jumlah yang relatif cukup untuk menampung

keterwakilan warga disediakan di area bekas sungai yang ditutup oleh beton. Ruang tersebut dimanfaatkan untuk berdiskusi antara warga etnis tempatan dengan etnis Tionghoa pelaksana perayaan *Cap Go Meh*.

Ruang publik dibentuk karena muncul reaksi warga yang merasa terusik karena ritual keagamaan Kong Hu Chu. Keterusikan warga disebabkan karena suara-suara dari instrumen (tambur dan tamborin) dalam ritual agama Kong Hu Chu dianggap bising dan menjadi polusi suara. Reaksi tersebut tidak hanya muncul dari etnis-etnis tempatan, sebagian besar etnis Tionghoa yang tidak memeluk agama Kong Hu Chu pun turut bereaksi menentang kebisingan yang diakibatkan oleh pihak kelenteng. Keterusikan warga tersebut dikarenakan mereka adalah "penduduk baru" yang bermukim di lokasi penelitian. Pada masa sebelumnya, tidak pernah ada keterusikan warga akibat lantunan suara dan musik yang mengiringi ritual etnis Tionghoa. Untuk mengatasi keterusikan warga tersebut, jemaah kelenteng berkoordinasi dengan pihak Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), tokoh gereja, dan tokoh masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai "kekhasan ritual" agama Kong Hu Chu. Warga

diberikan kesempatan untuk masuk dan melihat isi dan suasana kelenteng Dharma Ramsi.

Ruang publik disediakan di depan kelenteng dan bernuansa informal. Di tempat ini setiap orang dapat saling berdialog dan memberi masukan kepada pihak penyelenggara mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki. Dialog pada ruang publik tersebut dilakukan sebelum Tahun Baru Imlek. Pihak kelenteng menyediakan bangku dan meja sederhana di lengkapi dengan hidangan lokal, seperti kopi, bajigur, cakue, dan kacang yang mereka beli dari warga sekitar. Pihak penyelenggara, yakni jemaah kelenteng duduk bersama warga untuk berdialog atas kondisi yang dihadapi. Siapapun disilahkan duduk dan berbicara di tempat tersebut.

Dialog dalam ruang publik ini tidak sekedar membicarakan teknis penyelenggaraan perayaan *Cap Go Meh* semata. Dialog antara etnis tempatan dengan etnis Tionghoa meluas pada permasalahan warga masyarakat sekitar, seperti keamanan lingkungan, memudarnya rasa memiliki daerah, dan juga solidaritas antar etnik. Ruang publik ini diselenggarakan pada saat cuaca tidak hujan dan berlangsung antara pukul 20 hingga 22.30.

Dalam ruangan publik yang tersedia ini terjadi tindakan-tindakan komunikatif. Mengacu pada Habermas (1984: 360) ruang publik yang disediakan oleh jemaah kelenteng membentuk suatu jaringan yang mengkomunikasikan informasi dan berbagai cara pandang dari warga masyarakat. Arus-arus informasi yang muncul dalam komunikasi warga yang tertampil kemudian disaring dan dipadatkan. Informasi-informasi tersebut menjadi simpul-simpul opini publik yang spesifik bergantung pada konteks yang sedang dibicarakan. Ruang publik yang tersedia, berdasarkan pemikiran Habermas (1984), memiliki tujuan untuk membentuk opini dan kehendak yang mewakili kepentingan umum. Dapat dipahami bahwa pemikiran Habermas bersifat emansipatoris karena sifat teoretisi kritik yang lebih cenderung menekankan pada ranah-ranah akademik emansipatoris dan praksis (Bauman, 2010: 96).

3. Pendidikan Multikultur, Perubahan Habitus, dan Praktik Masyarakat

Keberadaan ruang publik tersebut menjadikan kesempatan dialog antar etnis menjadi lebih terbuka. Dialog yang tercipta merupakan bentuk interaksi diskursif. Warga etnis-etnis tempatan yang notabene mayoritas beragama Islam menyampaikan

pendapat-pendapat berupa singgungan antara agama Islam dengan ajaran Kong Hu Chu. Warga etnis tempatan meminta agar dalam pelaksanaan perayaan Cap Go Meh tetap memperhatikan standar budaya yang berlaku, menghormati keberadaan agama lain, dan menghormati waktu-waktu tertentu yang dianggap sakral. Dari pihak etnis Tionghoa, menyatakan bahwa mereka telah menyusun rangkaian acara yang spesifik, selalu ada penghentian acara saat kumandang azan selama sekitar 1 jam. Pihak keagamaan dari DKM setempat pun menyatakan bahwa susunan perayaan Cap Go Meh telah berkoordinasi dengan pihak DKM.

Interaksi diskursif mewujudkan menjadi dialog antar budaya dan kepercayaan. Pertukaran informasi mengenai budaya dan kepercayaan antara etnis tempatan dengan etnis Tionghoa membuka kesadaran kesejarahan. Etnis-etnis Tionghoa menyatakan bahwa mereka mengalami diskriminasi yang panjang. Diskriminasi ini dimulai sejak tahun 1959, di saat etnis Tionghoa terusir dari daerah perdesaan dan harus bermukim di wilayah perkotaan. Hak-hak berpolitik etnis Tionghoa, pada tataran tertentu, dibatasi dan diperlakukan sebagai warga negara yang berbeda. Satu-

satunya pilihan adalah berniaga di pusat kota. Para etnis Tionghoa menyatakan pula ada keuntungan dari diskriminasi tersebut, yakni dengan berniaga di pusat kota, secara langsung terdapat distribusi kapital dari masyarakat yang mengumpul di pusat kota. Etnis Tionghoa mendapat berkah dari distribusi kapital tersebut, yakni strata ekonominya lebih tinggi daripada etnis-etnis tempatan. Warga menanggapi hal tersebut sebagai suatu hal yang masuk akal. Pertukaran komoditas terjadi di area perkotaan; dan di area itulah etnis Tionghoa bermukim dan menumpuk kapital dari aliran distribusi kapital masyarakat.

Isu publik lainnya adalah mengenai sarana dan prasarana. Pihak warga etnis tempatan menyatakan bahwa kedatangan massa dalam jumlah banyak untuk ikut serta dalam perayaan Cap Go Meh, memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Masalah yang paling utama adalah penampungan para partisipan dan ketersediaan air bersih. Bersama dengan warga etnis tempatan, etnis Tionghoa penyelenggara perayaan Cap Go Meh, berembuk untuk membangun fasilitas tersebut. Dengan kuasa kapital, jemaah kelenteng membangun WC umum bagi warga dengan ketersediaan air artesis yang memadai. Warga dapat memanfaatkan

air tersebut jika mereka mengalami kekurangan air, terutama saat musim kemarau. Berkoordinasi dengan sebuah sekolah swasta di sekitar lokasi perayaan, para warga etnis tempatan, penyelenggara perayaan, dan pihak sekolah bersepakat bahwa sekolah tersebut dijadikan lokasi penginapan para partisipan perayaan Cap Go Meh.

Dialog lainnya adalah upaya pembatasan penumpukan manusia, terutama di depan Vihara Dharma Ramsi. Untuk mengatasi hal tersebut, dibuatkan panggung khusus bagi warga yang ingin menikmati hiburan musik dan lawak bernuansa Sunda, juga menampilkan kesenian wayang golek. Tempat penyelenggaraan hiburan tersebut terpisah hanya sekitar 30 meter dari kelenteng dan bertempat di sebuah lahan kosong di Gang Luna.

Upaya mereduksi konflik antar etnis terjadi juga dalam ruang publik tersebut. Berdasar masukan dari etnis tempatan, untuk meredam penentangan dari kelompok Islam garis keras, perayaan Cap Go Meh harus dibuka oleh tokoh yang dapat diterima oleh semua golongan. Konsensus yang dicapai adalah dipilihnya Gubernur Jawa Barat yang notabene berasal dari partai berplatform Islam untuk membuka perayaan Cap Go Meh Tahun 2011.

Pembukaan perayaan oleh gubernur dipandang sebagai langkah strategis, yakni untuk meredam penentangan dari golongan Islam. Pihak penyelenggara, pada H-2 membentangkan spanduk yang di dalamnya terdapat nama Gubernur Jawa Barat lengkap dengan gelar keagamaan dan gelar akademik sebagai bentuk informasi kepada warga dan juga upaya meredam konflik. Nama depan dari Gubernur Jawa Barat mencerminkan nuansa islami, sehingga konflik agama berhasil diminimalisir. Konsensus tokoh pembuka perayaan Cap Go Meh dilakukan pada tahun 2012, sejalan dengan program Bandung sebagai kota pariwisata dan ekonomi kreatif, pada tahun 2012, perayaan Cap Go Meh dibuka oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabinet Indonesia Bersatu II, yakni Mari Elka Pangestu. Bagi warga di sekitar lokasi penyelenggaraan, kehadiran para tokoh tersebut merupakan kebanggaan tersendiri, yaitu daerahnya pernah didatangi secara langsung oleh tokoh-tokoh terkemuka.

Serangkaian dialog yang tercipta dalam ruang publik menambah perbendaharaan wawasan dari para etnis tempatan dan juga etnis Tionghoa. Masing-masing menerima

input informasi ke dalam habitus masing-masing dan mengubah cara pandang atas pihak lain. Prasangka etnis yang sebelumnya menjadi habitus dan praktik berupa longgarnya ikatan antara etnis tempatan dengan etnis Tionghoa berubah seiring diterimanya input hasil dialog dalam ruang publik yang tersedia.

Perubahan habitus dan praktik tersebut menunjukkan bahwa:

- a. terdapat kesadaran sekat komunikasi antara etnis Tionghoa dengan etnis tempatan;
- b. terciptanya kesadaran pentingnya interaksi yang diskursif dan dialogis;
- c. terjadinya penurunan prasangka etnis yang signifikan disertai penurunan prasangka berdasar agama;
- d. terjadinya peningkatan interaksi antar etnis yang bersifat asosiatif;
- e. terciptanya kesadaran perbedaan standar budaya antara etnis-etnis tempatan dengan etnis Tionghoa; dan
- f. terciptanya kesadaran akan struktur budaya baku yang lebih besar yang dijadikan pedoman perilaku sehari-

hari;

C. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Ruang publik merupakan sarana pendidikan yang strategis dalam menggugah kesadaran multikultural. Melalui ruang publik konsensus-konsensus dalam masyarakat yang multikultur dapat dicapai guna menciptakan kebaikan kehidupan bersama dalam perbedaan dan kesederajatan. Keberadaan ruang publik pada situasi sosial yang plural diperlukan untuk membentuk habitus baru yakni kesadaran multikultur yang mengakui perbedaan dan berada dalam kesejajaran.

2. Saran

Berkait dengan kenyataan masyarakat Indonesia yang multikultur, perlu digagas penciptaan ruang-ruang publik dalam masyarakat terutama yang memiliki dimensi plural. Selain itu, berkaca dari kebermanfaatan ruang publik pada masyarakat, secara formal, pendidikan multikultural dapat dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan formal sedari dini untuk menciptakan generasi yang sadar akan pluralitas masyarakat.

D. DAFTAR PUSTAKA

- _____. (1984). *Distinction*. Cambridge: Harvard University Press. Bauman, Z. (2010). *Towards A*

- Critical Sociology: An Essay On Commonsense Emancipation*. New York: Routledge.
- _____. (1989). *The Structural Transformation Of The Public Sphere*. Cambridge, MA: MIT Press.
- _____. (2007). *Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- _____. (2008). *Between Naturalism And Religion: Philosophical Essays*. Cambridge: Polity Press.
- Bourdieu. J.F. (1979). *Algeria 1960*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Habermas, J. (1984). *Theory of Communicative Action*. Boston: Beacon.
- Hardiman, F.B. (2008). *Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik dan Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Harker, R. Mahar, C. dan Wilkes, C. (2009). *(Habitus X Modal) + Ranah = Praktik: Pengantar Paling Komprehensif Kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*. Yogyakarta: Jalasutra
- Kadarsih, R. (2008). Demokrasi Dalam Ruang Publik: Sebuah Pemikiran Ulang Untuk Media Massa Di Indonesia. *Dakwah*. Vol IX No.1. Januari-Juni 2008
- Macionis. J.J. (2012). *Sociology 14th Edition*. Upper Saddle River NJ: Pearson.
- Lefebvre. H. (2008). *Space, Difference, Everyday Life*. New York: Routledge.
- Liliweri. A. (2005). *Prasangka Dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: LKiS.
- Macionis, J.J. (2012). *Sociology 14th Edition*. Upper Saddle River NJ: Pearson.
- Prasetyo, A.G. (2012). Menuju Demokrasi Rasional: Melacak Pemikiran Jurgen Habermas tentang Ruang Publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.
- Ritzer, G. (2012). *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern Edisi Kedelapan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Supartiningsih. (2012). Multikulturalisme Dalam Perspektif Etika Diskursus Jurgen Habermas. *Prosiding Seminar Internasional Multikultural Dan Globalisasi 2012*. Depok: Universitas Indonesia.
- Suryadinata, L. (2002). *Negara dan Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia*. Jakarta: LP3ES
- Tripp, D. (2005). *Action Research: A Methodological Introduction*.

Melbourne: University of Murdoch.

Whyte, W.F. (1989). Advancing Scientific Knowledge Through Participatory Action Research. *Sociological Forum*, Vol. 4, No. 3 Sep., 1989.

Yusar. (2011). *Revivalisme Ajaran Konfusian Oleh Etnis Tionghoa di Kota Bandung: Studi Sosiologi Agama*. Program Studi Sosiologi FISIP Unpad. Tidak diterbitkan